KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DJAKA BUDHI UTAMA**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

| | |
|---|---|
| **Pihak Kedua,** | **Pihak Pertama,** |
| **MOH. MAHFUD MD** | **DJAKA BUDHI UTAMA** |

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**
**TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I**
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|
| Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | 100% |
| | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | 100% |
| | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti | 50% |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | 1. Nilai SAKIP | A |
| | 2. Nilai PMPRB | 33,93 |
| | 3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5) | 4 |
| | 4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi | 85 |

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Politik Dalam Negeri Rp. 15.528.921.000,- (Limabelas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Jakarta, Agustus 2021

**Menko Polhukam,**

**MOH. MAHFUD MD**

**Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,**

**DJAKA BUDHI UTAMA**

**DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI**

| | |
|---|---|
| Sasaran Strategis | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri |
| Indikator Kinerja 1 | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam |
| Definisi | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)<br>Capaian Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Unit analisis IDI adalah provinsi. Capaian IDI Nasional merupakan agregasi dari capaian provinsi ini. Selain capaian nasional, IDI menghasilkan nilai indeks untuk setiap provinsi, setiap aspek, setiap Variabel, dan setiap indikator. Secara keseluruhan hasil IDI merupakan suatu sketsa tentang kondisi demokrasi di Indonesia yang cukup komprehensif. Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Data untuk indikator-indikator ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui riviu surat kabar, riviu dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (well informed person) mengenai hal-hal tertentu di provinsi di mana mereka tinggal. Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.<br>Target IDI sesuai RPJMN TA. 2020-2024, Target IDI Tahun 2020 sebesar 77,36 yang di ukur di Tahun 2021 |
| Sumber Data | Survey Badan Pusat statistik (BPS) |
| Cara Menghitung | Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri<br>$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Capaian Target IDI pada dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah Target IDI pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ |

| | |
|---|---|
| Indikator Kinerja 2 | Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam |
| Definisi | Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam |
| Sumber Data | Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian bidang koordinasi politik dalam negeri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam |
| Cara Menghitung | $\sum = \frac{\textit{Realisasi rekomendasi kebijakan yang sesuai dokumen perencanaan nasional}}{\textit{Realisasi rekomendasi kebijakan bidang Politik Dalam Negeri}} \times 100\%$ |
| Indikator Kinerja 3 | Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti |
| Definisi | Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait. |
| Sumber Data | Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait |
| Cara Menghitung | $\sum = \frac{\textit{Butir rekomendasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti}}{\textit{Butir rekomendasi kebijakan Politik Dalam Negeri}} \times 100\%$ |
| Sasaran Strategis | Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal |
| Indikator Kinerja 1 | Nilai Sakip |

| | |
|---|---|
| Definisi | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.<br><br>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:<br>1. Perencanaan Kinerja<br>2. Pengukuran Kinerja<br>3. Pelaporan Kinerja<br>4. Evaluasi Internal<br>5. Capaian Kinerja |
| Sumber Data | Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam |
| Cara Menghitung | Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%).<br><br>Kategori Penilaian :<br>1. AA (91-100)<br>2. A (81-90)<br>3. BB (71-80)<br>4. B (61-70)<br>5. CC (51-60)<br>6. C (31-50)<br>7. D (0-30) |
| Indikator Kinerja 2 | Nilai PMPRB |
| Definisi | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Bidang Politik Dalam Negeri, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :<br>1. Manajemen Perubahan<br>2. Penataan Peraturan Perundang-undangan<br>3. Penataan dan Penguatan Organisasi<br>4. Penataan Tatalaksana<br>5. Penguatan Pengawasan<br>6. Penatan Sistem Manajemen SDM<br>7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja<br>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| Sumber Data | Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri |

| | |
|---|---|
| Cara Menghitung | Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada delapan area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5. |
| Indikator Kinerja 3 | Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5) |
| Definisi | Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan stakeholders di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terhadap pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum. |
| Sumber Data | Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dari stakeholders. |
| Cara Menghitung | $\sum = \frac{\text{Indeks pada pelayanan program dan evaluasi} + \text{Indeks pada Pelayanan tata usaha dan umum}}{2}$ |
| Indikator Kinerja 4 | Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi |
| Definisi | Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran. |
| Sumber Data | Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel:<br>1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan;<br>2. Keselarasan TOR & RAB;<br>3. Jumlah revisi;<br>4. Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional;<br>5. Respon Perencana unit organisasi;<br>6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev;<br>7. Kualitas Laporan Kinerja;<br>8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan;<br>9. Respon Pengelola Monev unit organisasi. |
| Cara Menghitung | Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu<br>*50 poin untuk unsur perencanaan<br>*50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan |

Deputi Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri,

DJAKA BUDHI UTAMA